

Model Hybrid Filantropi: Integrasi Dana Sosial dan Kewirausahaan Sosial untuk Pemberdayaan Berbasis Data

A. Fahmi Zakariya¹, Ika Nazilatur Rosida²,
¹Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban
²STAI Senori Tuban

E mail: fahmizakariya@gmail.com

E mail: ikanr98@gmail.com

Abstract

This research aims to conceptualize a hybrid philanthropy model that systematically integrates social funds and social entrepreneurship as a framework for advancing data driven community empowerment. Philanthropic practices in Indonesia have traditionally been dominated by charitable and consumptive approaches that yield limited and unsustainable social outcomes. In contrast, social entrepreneurship offers significant potential to address structural social challenges through innovative, market oriented mechanisms, yet its progress remains constrained by insufficient access to capital. This study employed a qualitative descriptive design with an exploratory case study approach. It investigated the practices of philanthropic institutions, social entrepreneurs, and beneficiary communities. Data were collected through in depth interviews, participant observation, document analysis, and an extensive literature review. The data were then analyzed using Miles and Huberman's interactive model, which consisted of data reduction, data display, and conclusion drawing. The research showed that the success of integration is determined by the availability and quality of structured data systems. Disparities in data access and the weak evidence base are the main obstacles in planning and evaluating philanthropic programs. Through the hybrid philanthropy model, this study develops a framework connecting three key components: (1) social funding as a source of financial resources and legitimacy, (2) social entrepreneurship as a driver of empowerment through innovative business models, and (3) impact based data systems as the foundation for accountability, efficiency, and targeting accuracy. The integration of these components results in a social impact hierarchy that illustrates the logical flow from inputs, processes, to outcomes and long term impacts. The implementation of this model has the potential to shift the paradigm of philanthropy in Indonesia from charity based to investment based, while strengthening the social economic resilience of communities through an evidence based empowerment ecosystem.

Keywords: Hybrid Philanthropy; Social Entrepreneurship; Social Funds; Community Empowerment; Impact Based Data



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHALUAN

Praktik filantropi di Indonesia berkembang sangat pesat, ditandai dengan meningkatnya pengumpulan dana sosial dari berbagai sumber seperti zakat, infak, sedekah, wakaf (ZISWAF), donasi publik, serta tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Indonesia bahkan menduduki peringkat pertama dalam World Giving Index (CAF, 2023), yang menunjukkan tingginya budaya memberi di masyarakat. Namun demikian, penggunaan dana filantropi sebagian besar masih bersifat karitatif dan konsumtif, sehingga tidak banyak memberikan dampak jangka panjang dalam menyelesaikan akar masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi

(PIRAC, 2022).

Di sisi lain, kewirausahaan sosial hadir sebagai pendekatan baru yang menggabungkan tujuan sosial dan praktik kewirausahaan. Wirausaha sosial memiliki kemampuan untuk menciptakan solusi inovatif, mandiri secara finansial, serta berkelanjutan dalam menyelesaikan masalah sosial (Defourny & Yssens, 2017). Sayangnya, pelaku kewirausahaan sosial sering mengalami kendala dalam mengakses sumber pendanaan, terutama dari dana sosial yang dikelola oleh lembaga lembaga filantropi (UNDP & ISEA, 2020).

Kondisi ini memunculkan kebutuhan untuk membangun sebuah model hybrid yang mengintegrasikan dana sosial dan kewirausahaan sosial dalam kerangka pemberdayaan masyarakat berbasis data. Model ini tidak hanya bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana filantropi, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem pemberdayaan yang lebih terarah, terukur, dan berdampak jangka panjang (Battilana et al., 2015). Meskipun filantropi di Indonesia memiliki potensi besar dan kewirausahaan sosial juga menawarkan pendekatan berkelanjutan,, hingga kini belum terdapat model yang sistematis untuk mengintegrasikan dana sosial dengan praktik kewirausahaan sosial yang berbasis data. Kesenjangan antara potensi dana sosial dan keterbatasan akses pendanaan bagi kewirausahaan sosial untuk membangun model pemberdayaan. Oleh karena itu, pertanyaan yang muncul dari peneliti: Bagaimana merancang model hybrid filantropi yang mampu menghubungkan dana sosial dan kewirausahaan sosial secara efektif, terukur, serta berkelanjutan untuk meningkatkan dampak pemberdayaan masyarakat?

Meskipun potensi dana sosial di Indonesia sangat besar, pemanfaatannya belum sepenuhnya diarahkan pada upaya produktif. Menurut Indeks Filantropi Indonesia, lebih dari 80% lembaga filantropi masih menyalurkan bantuan dalam bentuk bantuan langsung tunai atau santunan, dan hanya sebagian kecil yang telah mengembangkan model berbasis pemberdayaan (PIRAC, 2022). Padahal, pendekatan karitatif semacam ini bersifat sementara dan tidak menyelesaikan masalah struktural kemiskinan (Suryanto, 2021).

Di saat yang sama, laporan dari UNDP dan Indonesia Social Enterprise Association menunjukkan bahwa sebanyak 70% pelaku wirausaha sosial di Indonesia kesulitan dalam menjalin kemitraan dengan lembaga pendonor atau lembaga filantropi, sehingga mereka cenderung berjalan sendiri tanpa dukungan ekosistem finansial yang memadai (UNDP & ISEA, 2020)(UNDP & ISEA, 2020). Inilah yang menjadi fenomena gap, yaitu adanya ketimpangan antara potensi sumber daya (dana sosial) dengan instrumen strategis untuk pemanfaatannya (wirausaha sosial).

Sementara itu, dari sisi akademik, masih sedikit penelitian yang membahas integrasi

langsung antara dana sosial dan kewirausahaan sosial sebagai satu sistem pemberdayaan. Sebagian besar literatur hanya membahas filantropi dalam konteks bantuan atau charity, dan kewirausahaan sosial sebagai unit yang berdiri sendiri (Nicholls, 2010). Ini menjadi research gap, yaitu minimnya kajian yang merumuskan model integratif antara dua pendekatan tersebut yang diperkuat oleh pengambilan keputusan berbasis data (data driven) (Saebi et al., 2019).

Padahal, dalam era digital saat ini, data menjadi komponen penting dalam menentukan arah kebijakan sosial, termasuk dalam menyalurkan dana filantropi secara lebih tepat sasaran. Banyak program pemberdayaan gagal karena tidak didukung oleh data akurat tentang profil penerima manfaat, kebutuhan riil masyarakat, dan indikator keberhasilan (Kania & Kramer, 2011). Oleh karena itu, penerapan pendekatan berbasis data sangat penting untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas dalam integrasi dana sosial dan kewirausahaan sosial.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena menjawab tantangan strategis dalam pengelolaan dana sosial dan upaya pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam praktiknya, pengelolaan dana filantropi di Indonesia cenderung masih terfragmentasi dan belum sepenuhnya diarahkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat (Suryanto, 2021). Sebagian besar program filantropi masih bersifat karitatif dan jangka pendek, sementara fenomena sosial seperti kemiskinan struktural, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan berorientasi pada keberlanjutan (UNDP & ISEA, 2020).

Di sisi lain, kewirausahaan sosial tumbuh sebagai pendekatan yang inovatif dalam menyelesaikan persoalan sosial melalui model usaha yang berdampak. Namun, banyak pelaku kewirausahaan sosial mengalami hambatan dalam akses permodalan, kolaborasi lintas sektor, dan dukungan kebijakan yang memadai (Battilana et al., 2015). Di sinilah letak urgensi integrasi antara dana sosial dan kewirausahaan sosial sebuah model hybrid yang memadukan kekuatan solidaritas sosial dengan efisiensi ekonomi. Pengembangan model hybrid yang tidak hanya mengintegrasikan dana sosial dan kewirausahaan sosial, tetapi juga memposisikan data sebagai pondasi utama dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini menggunakan kerangka integratif baru yang menggabungkan aspek pendanaan, inovasi sosial, dan analisis berbasis data dalam satu sistem yang komprehensif, sesuatu yang belum banyak dijumpai dalam literatur sebelumnya. Penelitian ini menawarkan mekanisme operasional yang data dukung mulai dari pemetaan kebutuhan, seleksi penerima manfaat, hingga monitoring dampak yang memberikan kontribusi orisinal bagi penguatan ekosistem pemberdayaan berbasis filantropi di Indonesia. Dengan demikian, studi ini tidak hanya memperkaya aspek teoretis, tetapi juga memberikan model implementatif yang dapat digunakan oleh lembaga filantropi, pemerintah, maupun wirausaha sosial untuk meningkatkan

efektivitas dan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, minimnya penggunaan data dalam pengambilan keputusan terkait penyaluran dana sosial dan program pemberdayaan juga menjadi permasalahan serius. Tanpa pemanfaatan data yang sistematis dan terintegrasi, banyak program menjadi tidak tepat sasaran, tumpang tindih, atau gagal mencapai dampak sosial yang signifikan (Kania & Kramer, 2011). Oleh karena itu, pengembangan model hybrid filantropi berbasis data sangat diperlukan untuk membangun sistem pemberdayaan yang lebih akuntabel, terukur, dan tepat guna.

Secara akademis, penelitian ini juga berkontribusi dalam mengisi kekosongan literatur tentang integrasi antara filantropi dan kewirausahaan sosial yang belum banyak dieksplorasi secara komprehensif, terutama dengan pendekatan berbasis data (Saebi et al., 2019). Penelitian ini juga membuka peluang untuk merumuskan kebijakan baru dalam pengelolaan dana sosial berbasis inovasi sosial yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting secara teoritis, tetapi juga memiliki nilai praktis dan strategis yang tinggi, baik bagi lembaga filantropi, pemerintah, pelaku wirausaha sosial, hingga masyarakat sebagai penerima manfaat. Model yang ditawarkan diharapkan menjadi solusi alternatif yang relevan dalam menghadapi dinamika sosial ekonomi di era digital dan pasca pandemi saat ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus eksploratif. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam praktik pengelolaan dana sosial dan kewirausahaan sosial, serta merumuskan model integratif berbasis data yang relevan dan aplikatif. Menurut Yin (2016), studi kasus eksploratif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena kompleks dalam konteks nyata, khususnya ketika batas antara fenomena dan konteks tidak sepenuhnya jelas.

Jenis penelitian ini juga bersifat konseptual analitis, dengan mengkaji data empiris, studi pustaka, serta praktik nyata yang telah diterapkan oleh lembaga filantropi dan pelaku wirausaha sosial. Hal ini sejalan dengan Creswell dan Poth (2018) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif deskriptif dapat membantu peneliti menghasilkan pemahaman komprehensif melalui triangulasi data.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, studi literatur, yaitu penelusuran hasil penelitian terdahulu, laporan lembaga filantropi, dan dokumen kebijakan terkait filantropi serta kewirausahaan sosial (Nicholls, 2010)(Defourny & Yssens, 2017). Kedua, analisis dokumen institusional,

seperti laporan tahunan lembaga filantropi, laporan riset UNDP dan ISEA (2020), serta publikasi Indeks Filantropi Indonesia (PIRAC, 2022). Ketiga, observasi kasus, dengan menelaah praktik integrasi dana sosial dan kewirausahaan sosial yang telah diimplementasikan di beberapa wilayah Indonesia.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis, di mana data yang terkumpul dikelompokkan, dikategorikan, lalu diinterpretasikan sesuai dengan kerangka penelitian. Peneliti menggunakan strategi analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama terkait praktik integrasi filantropi dan kewirausahaan sosial berbasis data (Braun & Clarke, 2006).

Selain itu, penelitian ini juga bersifat konseptual, karena berupaya membangun model integratif yang menggabungkan kekuatan solidaritas sosial melalui dana filantropi dengan efisiensi ekonomi kewirausahaan sosial. Pendekatan ini didukung oleh pemanfaatan data driven decision making (Kania & Kramer, 2011) sehingga model yang dihasilkan tidak hanya relevan secara akademis tetapi juga aplikatif untuk implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fragmentasi Pengelolaan Dana Sosial: Masalah Struktural dalam Filantropi

Filantropi berasal dari kata *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia), yang berarti cinta kepada sesama manusia dalam bentuk tindakan nyata yang berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Dalam pengertian modern, filantropi mencakup aktivitas pemberian sumber daya baik finansial maupun non finansial untuk kepentingan sosial, kemanusiaan, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan (Salamon, 2014).

Di Indonesia, praktik filantropi sangat beragam dan tumbuh subur dalam bentuk bentuk seperti zakat, infak, sedekah, wakaf (ZISWAF), program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta donasi publik. Potensi besar dari instrumen instrumen ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan budaya solidaritas sosial yang tinggi. Akan tetapi, potensi besar ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan karena masih adanya fragmentasi dalam pengelolaan dana sosial yang bersifat struktural dan sistemik.

Fragmentasi tersebut tercermin dalam kecenderungan lembaga lembaga pengelola dana sosial baik lembaga zakat, yayasan sosial, perusahaan, maupun organisasi non profit yang bekerja secara terpisah tanpa koordinasi, integrasi program, atau sistem data yang saling terhubung. Akibatnya, program seringkali berjalan tumpang tindih, menyasar kelompok penerima manfaat yang sama, atau bahkan tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat. Selain itu, belum ada

standar nasional yang mengatur distribusi, pelaporan dampak, maupun evaluasi jangka panjang atas dana sosial yang dikelola.

Menurut BAZNAS dan riset PIRAC, potensi zakat nasional Indonesia mencapai sekitar Rp327 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunannya masih di bawah 10% dari jumlah tersebut. Bahkan dari dana yang berhasil dihimpun, lebih dari 60% digunakan untuk keperluan konsumtif, seperti bantuan sembako, santunan, dan pembangunan fasilitas fisik. Meskipun program program ini bermanfaat dalam jangka pendek, pendekatan semacam ini belum cukup untuk menciptakan dampak sosial yang transformatif dan berkelanjutan (BAZNAS & PIRAC, 2023).

Hal ini menunjukkan bahwa orientasi pengelolaan dana sosial di Indonesia masih didominasi oleh pola filantropi karitatif, yaitu pendekatan yang menekankan bantuan langsung untuk merespons kebutuhan darurat masyarakat. Pendekatan ini belum mampu mengubah struktur sosial ekonomi masyarakat secara fundamental, apalagi menciptakan kemandirian ekonomi bagi kelompok rentan. Di sinilah muncul urgensi untuk menggeser paradigma filantropi dari yang bersifat *charity based* menjadi *investment based*.

Salamon memperkenalkan konsep filantropi strategis, yang menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang, keberlanjutan, dan evaluasi berbasis data dalam mendistribusikan bantuan sosial (Salamon, 2014). Dalam konteks ini, filantropi seharusnya tidak hanya menjadi sarana belas kasih, tetapi juga sebagai instrumen perubahan sosial yang dirancang secara sistemik. Melalui pendekatan ini, dana sosial dapat diarahkan untuk meningkatkan kapasitas individu dan komunitas agar mampu keluar dari lingkaran kemiskinan.

Di sisi lain, perkembangan kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) di Indonesia menunjukkan potensi besar sebagai pendekatan pemberdayaan alternatif. Kewirausahaan sosial mampu memadukan tujuan ekonomi dan sosial dengan menciptakan unit usaha yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan nilai sosial melalui pemberdayaan masyarakat marginal (Nicholls & Pharoah, 2008). Maka, mengintegrasikan dana sosial ke dalam ekosistem kewirausahaan sosial merupakan langkah strategis untuk menciptakan dampak yang lebih berkelanjutan.

Model hybrid filantropi menjadi jawaban atas fragmentasi dan keterbatasan filantropi konvensional. Dalam model ini, dana ZISWAF, CSR, dan donasi publik tidak hanya digunakan untuk konsumsi, tetapi diinvestasikan ke dalam inisiatif produktif seperti koperasi usaha mikro, rumah produksi, pelatihan vokasional, atau modal usaha sosial berbasis komunitas. Hal ini

memungkinkan terjadinya siklus pemberdayaan yang berkelanjutan: dari bantuan menjadi pengembangan kapasitas, dari ketergantungan menjadi kemandirian (Hassan & Aliyu, 2018).

Namun demikian, keberhasilan model ini memerlukan landasan data yang kuat. Sayangnya, saat ini banyak lembaga filantropi masih belum memiliki sistem manajemen data yang terintegrasi dan akurat. Tanpa data, intervensi seringkali tidak tepat sasaran, dan dampaknya tidak dapat diukur secara objektif. Untuk itu, diperlukan pemanfaatan teknologi seperti data analytics, sistem informasi geografis (GIS), dan dashboard digital yang memungkinkan pemantauan real time dan evaluasi berbasis bukti (Salamon, 2014). Transformasi digital dalam pengelolaan dana sosial ini merupakan syarat mutlak agar pendekatan hybrid bisa diimplementasikan secara sistemik dan terukur.

Lebih lanjut, model ini juga membutuhkan dukungan kebijakan publik, mulai dari regulasi yang mendukung kolaborasi antar lembaga, insentif fiskal bagi lembaga filantropi produktif, hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang manajemen sosial dan wirausaha. Pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil perlu membangun sinergi dalam menciptakan ekosistem filantropi yang integratif dan berbasis data.

Dengan demikian, fragmentasi pengelolaan dana sosial bukan hanya soal teknis administrasi, tetapi merupakan masalah struktural yang menghambat efektivitas dan keberlanjutan dampak filantropi. Model hybrid filantropi menjadi alternatif strategis yang mampu menjawab persoalan ini melalui integrasi sumber daya, orientasi produktif, dan penggunaan data secara optimal. Pergeseran paradigma ini sangat penting untuk memastikan bahwa dana sosial yang begitu besar potensinya dapat benar benar menjadi motor perubahan sosial yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Kewirausahaan Sosial sebagai Alternatif Pemberdayaan

Kewirausahaan sosial merupakan pendekatan yang menggabungkan misi sosial dengan praktik kewirausahaan dalam rangka menyelesaikan masalah masalah sosial secara inovatif dan berkelanjutan. Konsep ini bukan sekadar menjalankan usaha untuk memperoleh laba, melainkan menggunakan aktivitas bisnis sebagai sarana untuk menciptakan dampak sosial yang nyata. Dees menyebut kewirausahaan sosial sebagai kombinasi antara semangat inovatif dunia bisnis dan komitmen terhadap misi sosial, di mana keuntungan finansial bukanlah tujuan utama, tetapi alat untuk memperluas jangkauan dampak dan meningkatkan kapasitas masyarakat yang dilayani (Dees, 1998).

Di Indonesia, kewirausahaan sosial mulai berkembang seiring dengan meningkatnya

kesadaran akan pentingnya inovasi sosial dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Sektor ini tumbuh dengan berbagai bentuk, mulai dari koperasi berbasis komunitas, startup berdampak sosial, hingga usaha kecil yang mempekerjakan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, dan masyarakat adat. Dalam konteks ini, kewirausahaan sosial berfungsi sebagai jembatan antara idealisme sosial dan profesionalisme bisnis, menjadikannya mitra strategis yang potensial bagi lembaga filantropi (Yunus et al., 2010).

Sementara itu, pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai proses sistematis untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok agar mampu mengakses sumber daya, mengelola potensi, serta membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka sendiri. Zimmermandalam teorinya menyebut bahwa pemberdayaan terdiri atas tiga dimensi utama, yaitu kontrol personal (personal control), kesadaran kritis (critical awareness), dan partisipasi kolektif (collective participation) (Zimmerman, 2000). Dalam konteks filantropi, pemberdayaan yang ideal adalah yang mampu mendorong transformasi dari posisi ketergantungan ke arah kemandirian yang berkelanjutan.

Namun, salah satu kendala utama dalam proses pemberdayaan adalah minimnya pendekatan yang mampu menjawab kebutuhan ekonomi sekaligus sosial masyarakat secara terintegrasi. Pendekatan filantropi konvensional cenderung bersifat transaksional bantuan diberikan, namun tidak ada kesinambungan dalam pendampingan maupun penguatan kapasitas ekonomi. Di sinilah kewirausahaan sosial tampil sebagai alternatif strategis. Berbeda dengan wirausaha konvensional yang mengejar profit, pelaku kewirausahaan sosial mengukur keberhasilan berdasarkan dampak yang dihasilkan terhadap masyarakat (Bacq & Janssen, 2011).

Model kewirausahaan sosial telah terbukti mampu menciptakan transformasi sosial di berbagai negara. Di India, misalnya, wirausaha sosial dalam bidang sanitasi dan air bersih berhasil mengatasi masalah kesehatan di komunitas miskin. Di Bangladesh, Grameen Bank yang didirikan oleh Muhammad Yunus menunjukkan bahwa skema mikrofinansial berbasis misi sosial dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Di Indonesia, inisiatif seperti "Du Anyam" yang memberdayakan perempuan melalui anyaman lokal, atau "Kitabisa" sebagai platform donasi publik yang mendukung program sosial berbasis komunitas, merupakan contoh konkret dari keberhasilan model ini dalam menciptakan dampak sosial yang luas dan inovatif (Yunus et al., 2010).

Namun demikian, pelaku usaha sosial di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam aspek akses terhadap modal dan dukungan pendampingan berkelanjutan. Laporan dari British Council menunjukkan bahwa banyak pelaku kewirausahaan sosial menghadapi

keterbatasan dalam memperoleh pembiayaan awal, terutama karena lembaga keuangan konvensional menilai usaha sosial sebagai investasi berisiko tinggi. Selain itu, masih minimnya pemahaman tentang kewirausahaan sosial di kalangan filantropis menyebabkan belum terbentuknya pola kolaborasi yang ideal antara lembaga pengelola dana sosial dan pelaku usaha sosial (British Council, 2018).

Dalam konteks inilah integrasi antara dana sosial dan kewirausahaan sosial menjadi penting. Dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan CSR tidak hanya dapat digunakan untuk bantuan konsumtif, tetapi juga bisa dioptimalkan sebagai bentuk social impact investment investasi berdampak sosial yang berfungsi sebagai modal awal (seed funding) bagi pelaku usaha sosial. Dengan pengelolaan yang akuntabel dan berbasis dampak, model ini dapat membuka peluang baru bagi filantropi untuk menjalankan peran strategis dalam mendukung transformasi ekonomi masyarakat miskin (Hassan & Aliyu, 2018).

Integrasi ini menciptakan sinergi antara dua entitas: dana sosial sebagai modal transformasi, dan usaha sosial sebagai kendaraan pemberdayaan. Dana sosial akan lebih produktif jika tidak berhenti pada tahap konsumsi, tetapi berputar dalam ekosistem usaha sosial yang berkelanjutan. Sementara itu, pelaku kewirausahaan sosial akan memperoleh akses modal yang selama ini sulit dijangkau, dengan risiko yang lebih terukur karena adanya orientasi dampak sosial, bukan semata profit. Sinergi ini sekaligus menjawab keterbatasan sistemik dalam model filantropi tradisional dan memperluas jangkauan pemberdayaan masyarakat.

Namun untuk memastikan keberhasilan integrasi ini, diperlukan pendekatan berbasis data. Lembaga filantropi harus mulai membangun sistem informasi yang mampu memetakan kebutuhan sosial, memonitor capaian dampak, dan mengevaluasi keberlanjutan program secara kuantitatif maupun kualitatif. Di era digital saat ini, pendekatan berbasis data merupakan elemen vital agar program filantropi dan usaha sosial dapat berjalan secara terukur, efisien, dan transparan (Salamon, 2014). Data juga menjadi jembatan kolaborasi yang memungkinkan sinergi antar lembaga, baik dari sektor sosial, bisnis, maupun pemerintah.

Dengan mengadopsi pendekatan hybrid antara filantropi dan kewirausahaan sosial, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengatasi tantangan sosial secara lebih sistemik dan berkelanjutan. Model ini tidak hanya memperluas fungsi dana sosial sebagai alat bantuan, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang dalam penciptaan nilai sosial. Di saat yang sama, kewirausahaan sosial mendapatkan fondasi keuangan dan legitimasi sosial yang dibutuhkan untuk bertumbuh. Kombinasi ini menjanjikan transformasi sosial yang lebih terukur, inklusif, dan tahan terhadap krisis di masa depan.

Ketimpangan Akses Data dan Ketiadaan Basis Bukti

Salah satu tantangan mendasar dalam pengembangan filantropi dan kewirausahaan sosial di Indonesia adalah minimnya penggunaan data yang valid, terstruktur, dan terukur sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Banyak lembaga sosial dan filantropi masih mengandalkan pendekatan intuitif, tanpa peta kebutuhan yang berbasis bukti atau indikator keberhasilan yang jelas. Akibatnya, berbagai program seringkali tidak tepat sasaran, terjadi tumpang tindih antar inisiatif, dan pada akhirnya tidak menciptakan dampak yang berkelanjutan (Kettunen, 2015).

Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan akses terhadap data sosial, baik dalam hal ketersediaan, kualitas, maupun kapasitas lembaga dalam mengelola dan memanfaatkannya. Banyak lembaga kecil tidak memiliki infrastruktur teknologi atau sumber daya manusia yang memadai untuk membangun sistem informasi sosial yang efektif. Bahkan pada tingkat nasional, integrasi data antar lembaga filantropi dan pemerintah masih sangat lemah, sehingga menghambat kolaborasi lintas sektor dan menciptakan duplikasi program (Salamon, 2014).

Analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi pendekatan berbasis data merupakan elemen krusial dalam pengembangan model hybrid filantropi. Pendekatan ini menempatkan data sebagai fondasi dalam seluruh proses intervensi sosial: mulai dari pemetaan masalah, identifikasi kelompok sasaran, desain program, hingga monitoring dan evaluasi dampak. Dengan data yang akurat, lembaga filantropi dan usaha sosial dapat merancang program pemberdayaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat dan mampu menciptakan perubahan yang terukur (Kettunen, 2015).

Ketiadaan basis data yang kuat juga menyebabkan ketergantungan pada narasi atau persepsi umum dalam menentukan arah program sosial. Misalnya, distribusi bantuan sering kali tidak mempertimbangkan profil kerentanan berbasis wilayah, jenis pekerjaan, atau kelompok usia. Dalam banyak kasus, intervensi diberikan secara merata tanpa mempertimbangkan ketimpangan distribusi kebutuhan. Hal ini menyebabkan pemborosan dana sosial, dan lebih jauh, memperkuat ketidakadilan dalam akses terhadap bantuan.

Model hybrid filantropi yang dikembangkan dalam penelitian ini menekankan pentingnya sistem data berbasis dampak (*impact based data system*). Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai repositori data, tetapi juga sebagai alat pengambilan keputusan yang memungkinkan lembaga untuk:

- a. Melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat berbasis geospasial;
- b. Mengidentifikasi kelompok sasaran dengan kriteria yang terukur;
- c. Menentukan skema intervensi sosial yang sesuai (bantuan langsung, pelatihan, pendanaan usaha sosial);
- d. Melakukan pelacakan kinerja program secara real time melalui indikator kuantitatif dan kualitatif;
- e. Menyusun laporan berbasis bukti untuk meningkatkan transparansi kepada donatur dan publik.

Dalam konteks teknologi digital saat ini, pendekatan ini sangat memungkinkan untuk diterapkan. Penggunaan dashboard digital, machine learning, dan big data analytics dapat membantu lembaga filantropi dalam membuat simulasi dampak, menganalisis efektivitas program, serta memproyeksikan kebutuhan masa depan berdasarkan tren sosial dan ekonomi yang ada (McKinsey Global Institute, 2018). Selain itu, keterbukaan data (open data) dari pemerintah daerah maupun pusat dapat menjadi mitra strategis dalam menyusun kebijakan pemberdayaan yang partisipatif dan berbasis bukti.

Kettunen menegaskan bahwa pemanfaatan data dalam kebijakan sosial tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas lembaga kepada masyarakat dan donatur. Dalam dunia filantropi, transparansi menjadi elemen penting untuk menjaga kepercayaan publik. Dengan sistem data yang terstandar dan terbuka, lembaga dapat menunjukkan capaian program secara objektif, bukan hanya melalui narasi keberhasilan, tetapi melalui angka, grafik, dan visualisasi dampak (Kettunen, 2015).

Selain itu, integrasi data juga mendorong kolaborasi lintas lembaga. Ketika data digunakan bersama oleh berbagai actor filantropi, NGO, pemerintah, dan usaha social maka potensi sinergi menjadi lebih besar. Data memungkinkan perencanaan yang terpadu, penghindaran tumpang tindih program, serta pembagian peran yang lebih efisien antar lembaga (Salamon, 2014).

Namun demikian, transisi menuju filantropi berbasis data bukan tanpa tantangan. Diperlukan peningkatan kapasitas SDM dalam hal literasi data, investasi dalam infrastruktur digital, serta penguatan regulasi yang mendorong keterbukaan informasi. Di samping itu, penting juga membangun budaya organisasi yang menghargai evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan. Tanpa komitmen pada akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan, data hanya akan menjadi formalitas administratif belaka.

Sebagai penutup, model hybrid filantropi tidak hanya membutuhkan dana dan ide yang

baik, tetapi juga basis bukti yang kuat dan terstruktur. Dengan menjadikan data sebagai tulang punggung perencanaan sosial, filantropi dan kewirausahaan sosial dapat melangkah lebih strategis dalam menciptakan perubahan sosial yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan

Integrasi Dana Sosial dan Kewirausahaan Sosial dalam Model Hybrid

Model hybrid filantropi merupakan pendekatan inovatif yang menggabungkan kekuatan dana sosial dan kewirausahaan sosial dalam satu kerangka pemberdayaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pendekatan ini merespons tantangan dari kedua sisi: keterbatasan keberlanjutan pada model filantropi tradisional yang bersifat karitatif, serta keterbatasan sumber daya dan akses modal pada pelaku kewirausahaan sosial. Model ini mencoba menjembatani dua logika yang sebelumnya sering dianggap bertentangan: logika sosial (misi, keadilan, empati) dan logika pasar (efisiensi, keberlanjutan, skalabilitas) (Nicholls & Cho, 2006).

Filantropi konvensional seringkali berhenti pada tahap bantuan konsumtif misalnya pembagian sembako, santunan, atau pembangunan fasilitas fisik yang meskipun berdampak jangka pendek, namun tidak menciptakan transformasi struktural terhadap akar permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi (Salamon, 2014). Di sisi lain, kewirausahaan sosial memiliki potensi untuk menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan melalui aktivitas usaha yang menjawab masalah sosial, namun kerap kesulitan dalam mengakses pembiayaan awal dan infrastruktur pendukung (British Council, 2018).

Model hybrid filantropi yang ditawarkan dalam penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa solusi jangka panjang terhadap permasalahan sosial memerlukan integrasi antara modal sosial, inovasi ekonomi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Model ini tidak hanya mengalirkan dana sosial ke sektor konsumtif, tetapi mengalihkannya ke sektor produktif dalam bentuk pendanaan usaha sosial, pelatihan kewirausahaan, serta pengembangan ekosistem pemberdayaan yang menyeluruh. Tiga Pilar Utama Model Hybrid

a. Dana Sosial sebagai Sumber Daya Keuangan dan Legitimasi Sosial

Dana sosial termasuk zakat, infak, sedekah, wakaf (ZISWAF), CSR, dan donasi publik merupakan sumber daya keuangan yang memiliki potensi besar untuk mendanai kegiatan ekonomi produktif masyarakat bawah. Dalam model hybrid, dana sosial tidak hanya diposisikan sebagai bantuan langsung, tetapi sebagai modal awal (seed funding) atau modal bergulir (revolving fund) yang dialokasikan untuk mendukung usaha sosial berbasis komunitas (Hassan & Aliyu, 2018). Dengan pendekatan ini, dana sosial menjadi instrumen strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi, bukan hanya sebagai penyangga

ketimpangan sementara.

b. Kewirausahaan Sosial sebagai Platform Pemberdayaan

Usaha sosial dalam konteks ini berfungsi sebagai kendaraan utama pemberdayaan masyarakat. Berbasis pada prinsip inovasi, keberlanjutan, dan inklusivitas, kewirausahaan sosial menjadi medium untuk menciptakan nilai ganda: nilai ekonomi bagi pelaku usaha dan nilai sosial bagi komunitas penerima manfaat (Dees, 1998). Pelaku usaha sosial tidak hanya menjual produk atau jasa, tetapi juga memberikan solusi atas persoalan sosial seperti akses pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi perempuan atau penyandang disabilitas (Yunus et al., 2010). Dalam skema ini, lembaga filantropi dapat bertindak sebagai inkubator atau akselerator, memberikan pelatihan, pendampingan, serta evaluasi berbasis kinerja sosial dan bisnis.

c. Sistem Data sebagai Fondasi Akuntabilitas dan Efisiensi

Integrasi antara dana sosial dan kewirausahaan sosial tidak akan efektif tanpa dukungan sistem informasi yang kuat. Data berperan sebagai fondasi dalam merancang strategi, memantau efektivitas program, dan mengukur dampak. Dalam model ini, dibangun sistem data berbasis dampak (*impact based data system*) yang mampu memetakan kebutuhan sosial secara spasial, menganalisis efektivitas intervensi secara real time, dan meningkatkan akuntabilitas lembaga kepada publik dan donatur (Kettunen, 2015). Selain itu, data juga menjadi alat untuk menghindari tumpang tindih program, serta menyusun skema pendanaan yang lebih responsif dan efisien.

Sinergi Tiga Komponen: Dana – Usaha – Data

- a. Model hybrid filantropi secara konseptual merupakan interseksi dari tiga komponen utama:
- b. Dana sosial sebagai sumber daya finansial dan sosial,
- c. Wirausaha sosial sebagai pelaksana pemberdayaan berbasis inovasi,
- d. Sistem data sebagai alat bantu pengambilan keputusan, evaluasi, dan transparansi.

Ketika ketiganya diintegrasikan secara strategis, tercipta lingkaran pemberdayaan yang berkelanjutan: dana sosial mendukung usaha sosial, usaha sosial menciptakan dampak, dan data memastikan akuntabilitas dan perbaikan terus menerus. Integrasi ini bersifat dinamis dan dapat diterapkan secara fleksibel oleh berbagai aktor: lembaga filantropi, organisasi masyarakat sipil,

perusahaan melalui CSR, maupun pemerintah daerah.

Di Indonesia, potensi penerapan model ini sangat besar, terutama dalam konteks pembangunan berbasis komunitas. Banyak komunitas lokal memiliki kekuatan sosial dan kultural yang bisa menjadi basis wirausaha sosial, sementara dana sosial tersedia melalui berbagai kanal (ZISWAF, CSR, crowdfunding digital, dll.). Tantangan terbesarnya adalah bagaimana mengelola ketiganya dalam satu sistem yang terstruktur, terukur, dan transparan.

Dengan demikian, model hybrid filantropi memberikan tawaran baru bagi ekosistem pemberdayaan di Indonesia. Bukan sekadar menjembatani logika sosial dan logika pasar, model ini menjadi arsitektur pemberdayaan sosial yang berbasis bukti dan berdampak jangka panjang. Melalui pendekatan ini, lembaga sosial tidak hanya menjadi penyalur bantuan, tetapi juga katalis perubahan struktural yang memperkuat daya tahan sosial ekonomi masyarakat.

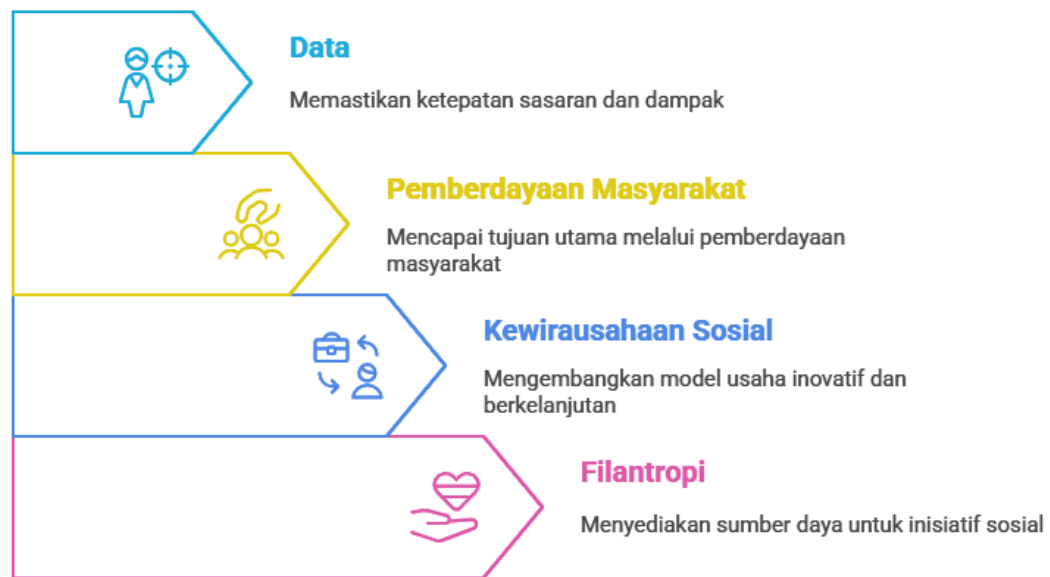
Analisis Dampak Sosial

Untuk melihat analisis dampak sosial dari model hybrid filantropi: integrasi dana sosial dan kewirausahaan sosial untuk pemberdayaan berbasis data perlu melihat konsep di bawah ini:

1. Filantropi menyediakan sumber daya;
2. Kewirausahaan sosial menyediakan model usaha yang inovatif dan berkelanjutan;
3. Pemberdayaan masyarakat menjadi tujuan utama;
4. Data menjadi alat untuk memastikan bahwa semua proses berjalan secara tepat sasaran dan berdampak.

Dari sini bisa dilihat bentuk diagram hierarki dampak sosial dari model hybrid filantropi: integrasi dana sosial dan kewirausahaan sosial untuk pemberdayaan berbasis data untuk melihat gambarannya:

Hierarki Dampak Sosial



Pejelasan hierarki dampak social pada diagram di atas dapat dilihat sebagaimana mana berikut:

1. Filantropi (A) menyediakan Sumber Daya (B) yang diperlukan untuk mendukung inisiatif.
2. Sumber Daya (B) tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Kewirausahaan Sosial (C).
3. Kewirausahaan Sosial (C) mengembangkan Model Usaha Inovatif & Berkelanjutan (D).
4. Model Usaha Inovatif & Berkelanjutan (D) ini bertujuan untuk mencapai Pemberdayaan Masyarakat (E).
5. Pemberdayaan Masyarakat (E) menjadi Tujuan Utama (F) dari seluruh proses.
6. Data (G) berperan penting dalam memantau dan mengevaluasi efektivitas dari Filantropi (A), Kewirausahaan Sosial (C), dan Pemberdayaan Masyarakat (E).
7. Data (G) digunakan untuk Memastikan Ketepatan Sasaran & Dampak (H) dari program.

Diagram ini menunjukkan bahwa filantropi, kewirausahaan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan data saling terkait dan saling mendukung. Filantropi menyediakan sumber daya, kewirausahaan sosial menawarkan model usaha yang inovatif, pemberdayaan masyarakat menjadi tujuan utama, dan data memastikan bahwa semua proses berjalan secara efektif dan berdampak positif. Memahami keterkaitan ini penting untuk merancang dan melaksanakan program-program yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi

KESIMPULAN

Model hybrid filantropi merupakan pendekatan strategis dan transformatif dalam menjawab berbagai keterbatasan struktural yang selama ini menghambat efektivitas pengelolaan dana sosial di Indonesia. Kajian ini menunjukkan bahwa model filantropi konvensional yang masih dominan bersifat karitatif dan konsumtif belum mampu menyelesaikan akar persoalan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi secara berkelanjutan. Fragmentasi dalam penyaluran dana, pendekatan yang tidak berbasis data, serta ketergantungan pada bantuan sesaat menjadi penghalang bagi terciptanya pemberdayaan yang inklusif dan berdampak jangka panjang.

Sementara itu, kewirausahaan sosial hadir sebagai alternatif yang inovatif dan berkelanjutan dalam menyelesaikan persoalan sosial melalui pendekatan berbasis pasar, nilai sosial, dan inovasi. Namun potensi ini masih dibatasi oleh keterbatasan akses terhadap modal dan pendampingan sistematis. Di sinilah integrasi dengan dana sosial menjadi krusial: dana sosial tidak hanya berfungsi sebagai bantuan, melainkan sebagai modal transformasional yang mendukung pertumbuhan usaha sosial sebagai agen pemberdayaan masyarakat.

Lebih jauh, penggunaan sistem data berbasis dampak menjadi elemen fundamental dalam model hybrid ini. Data bukan hanya alat bantu administratif, tetapi menjadi fondasi pengambilan keputusan yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel. Dengan pendekatan berbasis bukti, program pemberdayaan dapat dirancang lebih tepat sasaran, diukur dampaknya, serta diperbaiki secara berkelanjutan.

Model hybrid filantropi sebagaimana dirumuskan dalam kajian ini mengintegrasikan tiga komponen utama:

- a. Dana sosial sebagai sumber daya finansial dan legitimasi sosial,
- b. Kewirausahaan sosial sebagai instrumen pemberdayaan berbasis inovasi dan keberlanjutan,
- c. Sistem data sebagai fondasi akuntabilitas, efisiensi, dan perbaikan berkelanjutan.

Ketiga elemen ini jika dikelola secara terintegrasi akan menciptakan sinergi pemberdayaan yang mampu melampaui pendekatan tradisional. Model ini bersifat fleksibel dan aplikatif, serta dapat diadopsi oleh lembaga filantropi, organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah, maupun pelaku usaha sosial dalam upaya menciptakan perubahan sosial yang sistemik, inklusif, dan berbasis bukti.

Dengan demikian, model hybrid filantropi tidak hanya menjembatani logika sosial dan logika pasar, tetapi juga membangun ekosistem pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek perubahan, bukan sekadar objek penerima bantuan. Ini adalah langkah menuju arsitektur

filantropi masa depan yang berkelanjutan, berdampak, dan berbasis data.

REFERENSI

- Bacq, S., & Janssen, F. (2011). The multiple faces of social entrepreneurship: A review of definitional issues based on geographical and thematic criteria. *Entrepreneurship & Regional Development*, 23(5–6), 373–403.
- Battilana, J., Lee, M., Walker, J., & Dorsey, C. (2015). In search of the hybrid ideal. *Stanford Social Innovation Review*, 13(3), 51–55.
- BAZNAS & PIRAC. (2023). *Laporan Potensi dan Realisasi Zakat Nasional 2023*.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- British Council. (2018). The State of Social Enterprise in Indonesia. In Retrieved from <https://www.britishcouncil.id>.
- CAF. (2023). *World Giving Index 2023: A global view of giving trends*. Charities Aid Foundation. <https://www.cafonline.org>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.)*. Sage Publications.
- Dees, J. G. (1998). *The meaning of social entrepreneurship*.
- Defourny, J., & Yssens, M. (2017). Fundamentals for an international typology of social enterprise models. *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 8(6), 2469–2497.
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). *Islamic Social Finance: Waqf, Zakat and Sadaqah for Poverty Alleviation and Sustainable Development*. Palgrave Macmillan.
- Kania, J., & Kramer, M. (2011). Collective impact. *Stanford Social Innovation Review*, 9(1), 36–41.
- Kettunen, P. (2015). The role of data in evidence-based social policy. *European Journal of Social Science Research*, 28(4), 379–393.
- McKinsey Global Institute. (2018). *The Age of Analytics: Competing in a Data-Driven World*.
- Nicholls, A. (2010). The legitimacy of social entrepreneurship: Reflexive isomorphism in a pre-paradigmatic field. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 34(4), 611–633.
- Nicholls, A., & Cho, A. H. (2006). *Social entrepreneurship: The structuration of a field*. (In A. Nich). Oxford University Press.
- Nicholls, A., & Pharoah, C. (2008). *The Landscape of Social Investment: A Holistic Topology of Opportunities and Challenges*.
- PIRAC. (2022). *Indeks Filantropi Indonesia 2022*. Public Interest Research and Advocacy Center.
- Saebi, T., Foss, N. J., & Linder, S. (2019). Social entrepreneurship research: Past achievements and future promises. *Journal of Management*, 45(1), 70–95.
- Salamon, L. M. (2014). *Leverage for Good: An Introduction to the New Frontiers of*

Philanthropy and Social Investment. Oxford University Press.

- Suryanto, A. (2021). Strategi transformasi filantropi Islam menuju pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Islam*, 7(1), 45–60.
- UNDP, & ISEA. (2020). *Unlocking the potential of social enterprises for inclusive development in Indonesia*. United Nations Development Programme & Indonesia Social Enterprise Association.
- Yin, R. K. (2016). *Case study research and applications: Design and methods (6th ed.)*. Sage Publications.
- Yunus, M., Moingeon, B., & Lehmann-Ortega, L. (2010). Building social business models: Lessons from the Grameen experience. *Long Range Planning*, 4(2–3), 308–325.
- Zimmerman, M. A. (2000). *Empowerment theory: Psychological, organizational, and community levels of analysis*. (In J. Rapp). , *Handbook of Community Psychology* (pp. 43–63).